

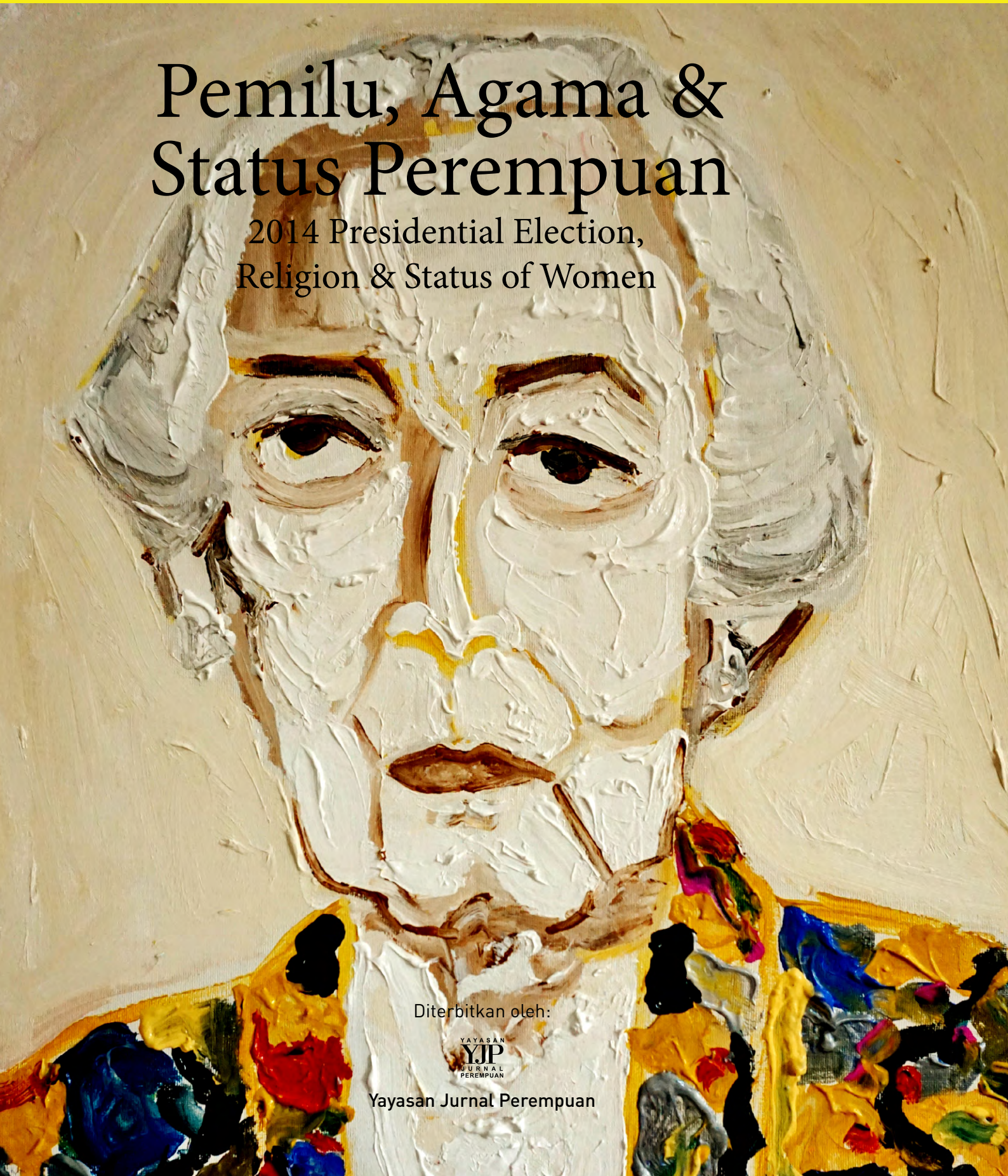
Pemilu, Agama & Status Perempuan

2014 Presidential Election,
Religion & Status of Women

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

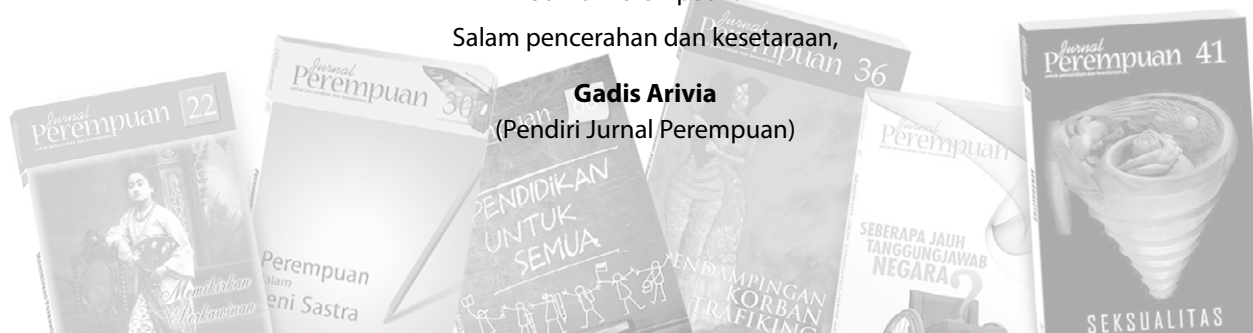
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Agustus 2014



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: Status Perempuan dalam Politik.....	iii-iv
Artikel / Articles	
• Etika Feminis Melawan Stigma Teokrasi-Patriarki: Refleksi Pemilihan Presiden 2014 / <i>Feminist Ethics against Stigma of Theocracy-Patriarchy: a Reflection of 2014 Presidential Election</i> <i>Rocky Gerung</i>	175-182
• Stereotip Ibu Negara & Karir yang Disembunyikan: Kajian Peranan dan Persepsi Istri Capres-Cawapres pada Pemilihan Presiden 2014 / <i>Stereotype of State's Mother and the Hidden-Career: a Study on the Roles and Perception of Wives of Presidents and Vice Presidents Candidates in the 2014 Election...</i> <i>Gadis Arivia</i>	183-189
• Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam: Tafsir <i>Al Hurriyah</i> , <i>Al Musawah</i> , <i>Al Karamah</i> dan <i>Al Adalah</i> / <i>Women's Status in Contemporary Islamic Politics: Tafsir of Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah and Al Adalah</i> <i>Husein Muhammad</i>	191-196
• Genealogi Politik Islam Fatayat di Era Soekarno dan Soeharto: Kajian Feminisme Sejarah Organisasi / <i>Genealogy of Islamic Fatayat Politics in the Era of Soekarno and Soeharto: a Feminist Studies on Organizational History</i> <i>Nihayatul Wafiroh</i>	197-205
• Saudari-Saudari Yang Hilang dalam Ruang Publik: Kajian Sosio-Teologis Kristen terhadap Peran Politik Perempuan / <i>The Lost-Sisters in the Public Sphere: a Study of Socio-Theological Christianity on the Roles of Women's Politics</i> <i>Ira D. Mangililo</i>	207-219
• Prasangka Budaya atas Tubuh dalam Perda-Perda Diskriminatif: Politisasi Agama atas Perempuan / <i>Cultural Prejudice against Female's Bodies in Discriminative Local Regulations: Politicization of Religion and Women</i> <i>Indraswari</i>	221-226
• Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 / <i>Political Roles of Women in the Legislative and Presidential Election</i> <i>Anita Dhewy</i>	227-232
• Agama, Pemilu 2014 dan Status Perempuan sebagai Liyan / <i>Religion, 2014 General Election and Status of Women as Other</i> <i>Dewi Candraningrum</i>	233-240
Wawancara / Interview	
• Joko Widodo: "Tidak Boleh Ada yang Menghalangi Perempuan" / <i>Joko Widodo: "No One Shall Block Women's Political Participation!"</i> <i>Dewi Candraningrum</i>	241-243
Kata dan Makna / Words and Meanings	245-246
Profil / Profile	
• Feminis Muslim Lies Marcoes-Natsir: "Perlunya Nilai Bersama dalam Menghadapi Fundamentalisme Agama" / <i>Lies Marcoes-Natsir: "We Need Communal Values to Speak Against Religious Fundamentalism"</i> <i>Mariana Amiruddin</i>	247-251
Resensi Buku/ Book Review	
• Peran Politik Perempuan dalam Gerakan Fundamentalisme / <i>Political Roles of Women against Fundamentalism</i> <i>Anita Dhewy</i>	253-256

“Status Perempuan dalam Politik”

Asia adalah rumah bagi 60 persen lebih penganut agama-agama mayoritas sekarang seperti Hindu, Budha, Kristen, Katolik, Islam, dan banyak aliran kepercayaan dan keyakinan lainnya. Dan Indonesia adalah rumah dari penduduk Muslim terbesar di dunia. Asia tenggara khususnya memiliki karakter yang kuat sekali dalam perbedaan lanskap kebudayaan dengan konstelasi politik, ekonomi, demografi dan tradisi sosial yang sangat beragam. Aliran kebudayaan transversal bersinggungan dengan aliran agama seringkali mengawinkan kelompok-kelompok etno-religius. Dan dalam hal ini, modernitas menyumbang kelahiran dari fundamentalisme agama dalam politik kenegaraan. Dan korban paling nestapa dari kelahirannya adalah perempuan dan para Liyan. Lanskap baru ini mempengaruhi dan memberikan kontribusi pada bagaimana perempuan menggunakan agensinya, menggunakan ruang untuk melakukan manuver dalam arena publik yang bersifat strategis dan politis. Prediksi bahwa sekularisme akan tetap bertahan dan berkuasa dalam pertumbuhan kehidupan negara dan politik di Asia Tenggara pada dekade terakhir dipatahkan oleh semakin besarnya pengaruh agama terhadap negara melalui partai politiknya, terutama Indonesia dan Malaysia. Agama tidak hanya merangsek dalam arena publik tetapi juga masuk dalam proses-proses dan pokok-pokok peristiwa politik dan kenegaraan. Lalu bagaimana implikasinya bagi kehidupan politik dan sosial? Banyak feminis ragu dan tak percaya karena yang memenangkan dan menguasai kursi-kursi politik dan parlemen adalah tafsir-tafsir agama yang misoginis dan tak ramah pada Liyan. Fragmentasi politik dan misoginisme baru bermunculan dalam wajah politik dunia. Bahkan institusi hegemonik seperti negara dan pasar telah diubah oleh agama umat tertentu dan kemudian banyak penganut agama lain sangat dirugikan karenanya. Matra gender diabaikan dan jadi tema

semena-mena dalam pertarungan politik, baik skala internasional, nasional dan lokal.

Meskipun Indonesia menjadi salah satu contoh terbaik praktek Islam moderat dan progresif, akan tetapi wajah-wajah tafsir yang tak ramah pada perempuan, minoritas seksual, etnis minoritas dan kelompok rentan lainnya masih mewarnai perjalanannya pada dekade terakhir. Tahun 1980-an merupakan tahun kebangkitan bagi revivalisme Islam di Indonesia, kemudian berkembang dengan pesat setelah jatuhnya rejim otoriter Orde Baru, Soeharto di tahun 1998. Partai-partai politik berbasis Islam (seperti PPP, PKB, PAN, PKS, dan PBB) berdiri dan sampai sekarang kuat menancapkan pengaruhnya dalam sistem politik dan kenegaraan di Indonesia. Dan perolehan suara di Pemilu Legislatif 9 April kemarin mereka mengalami kenaikan suara seperti yang dikabarkan dalam rubrik *RISSET Jurnal Perempuan* 82 kali ini. Dus, agama dan politik tetap tidak bisa dipisahkan dalam urusan kenegaraan. Tak hanya di pusat, sejak tahun 2001 Daerah Istimewa Aceh merupakan salah satu contoh ekstrem dimana perempuan kemudian banyak dikebiri hak-haknya melalui Qanun Syariah—berbeda jauh dari jaman Cut Nyak Dien dimana perempuan jauh lebih merdeka dan perkasa. Perempuan Aceh kini banyak sekali dibatasi dari cara berpakaian, berkendara, berada di ruang publik, sampai cara perempuan berswara dan tertawa pun juga diatur. Kecurigaan besar atas tafsir tak ramah gender yang masuk dalam diskursus politik ini bukan tanpa alasan.

Kerja keras perempuan dalam dua organisasi massa Islam terbesar Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah untuk menampilkan wajah Islam yang tidak misoginis terbengkalai dan dipukul mundur oleh wajah tafsir baru yang tak lagi ramah pada para Liyan. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah anggota legislatif jadi perempuan di parlemen 2014 ini, dimana perempuan hanya menempati sekitar 17% dari seluruh jumlah

kursi. Ini bukan kabar gembira. Status perempuan masihlah (l)iyah. Revivalisme Islam dalam politik, seperti dalam temuan Susan Blackburn dalam bukunya *Women and the State in Modern Indonesia* (Cambridge University Press, 2004) justru menambah beban terhadap perempuan dan memperlihatkan wajah diskriminatifnya yang kentara. Setiap kali didiskusikan agama dan politik, maka aspek stabilitas dan pertahanan merupakan pokok pertama

yang dibicarakan. Sedangkan nasib perempuan dan para (l)iyah seringkali diabaikan. Tugas dari kajian Jurnal Perempuan pada edisi kali ini adalah untuk menarasikan kajian analitik untuk mempertanyakan posisi agama dalam politik dan negara secara ontologis; serta memetakan konsekuensi dan implikasinya bagi kesetaraan gender dan keadilan bagi (l)iyah dalam narasi Pileg dan Pilpres tahun 2014 ini. **(Dewi Candraningrum, Pemimpin Redaksi).**

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Rocky Gerung. Departemen Filsafat, FIB, Universitas Indonesia.
Kampus UI Depok Jawa Barat 16424, Telp. +62.21.7863528,
+62.21.7863529, Faks. +62.21.7270038

Etika Feminis Melawan Stigma Teokrasi-Patriarki: Refleksi Pemilihan Presiden 2014

Feminist Ethics against Stigma of Theocracy-Patriarchy: a Reflection of 2014 Presidential Election

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 175-182, 4 daftar
pustaka.

Feminist politics is a perpetual investment in a just civilization. It awares of the injustice structure that is inherently located within the sociological body of patriarchal system. It needs more than voluntary-echo in democracy rather a strong conceptual tools that will enlighten the dialectic transport of communication in democratic system. Any feminists shall be alert to watch and guard, as well as, cynically, radically, monitor the run of the new-elected president—whether he will bring mandate of equality or not. Short-term strategy has been invested to block the new-order regime to take control; and long-term strategy shall be invested to guarantee the system of equality in the new cabinet.

Keywords: ethics of feminism, women, theocracy-patriarchy, presidential election.

Politik feminis adalah investasi peradaban. Politik feminis telah lama mengetahui bahwa menjadi perempuan dan mengalami ketidakadilan adalah satu paket sosiologi yang diselenggarakan oleh sistem patriarki. Bahwa keperluan perubahan politik tidak saja memerlukan partisipasi lapangan, tapi terlebih ketajaman diskursus dalam membaca struktur ketidakadilan itu. Itulah sebabnya diperlukan terus-menerus pemahaman teoretik yang kuat agar euforia politik lapangan itu tidak menghanyutkan peralatan-peralatan konseptual feminis, yaitu peralatan pikiran dan keyakinan tentang keadilan yang lebih radikal. Politik feminis juga memahami bahwa upaya menyelenggarakan keadilan itu, pada momen-momen kritis seperti Pemilu, memerlukan “strategi jangka pendek” untuk secara minimal mencegah masuknya watak otoritarian dalam politik.

Kata kunci: etika feminis, perempuan, teokrasi-patriarki, pemilihan presiden

Gadis Arivia. Departemen Filsafat, FIB, Universitas Indonesia.
Kampus UI Depok Jawa Barat 16424, Telp. +62.21.7863528,
+62.21.7863529, Faks. +62.21.7270038

Stereotip Ibu Negara & Karir yang Disembunyikan: Kajian Peranan dan Persepsi Istri Capres-Cawapres pada Pemilihan Presiden 2014

Stereotype of State's Mother and the Hidden-Career: a Study on the Roles and Perception of Wives of Presidents and Vice Presidents Candidates in the 2014 Election

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 183-189, 16 daftar
pustaka.

This paper investigates stereotype of first ladies and image being built during 2014 Indonesia presidential election. Wives of candidates in the election are highly accomplished as well as being graduated from universities, yet these facts are not exposed adequately in the media as part of public education on equality. Most of the time, they are being posited as faithful-partner and bold-supporter of their husbands/partners. Interviews held by the media frequently narrate the drama within the house, family, and their romance. Their career and professionalism are being hidden from the public. Platform

of empowerment and gender equality are highly cultivated, promoted, and campaigned by political-parties as well as NGOs, yet missed the wives to be involved. The capacity of the presidential candidate's wives on gender, equality and women's empowerment platforms designed by the political parties need to be promoted and scrutinized.

Keywords: first ladies, wife, career, presidential election.

Tulisan ini mengkaji stereotip ibu Negara dan *image* yang terbangun pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Para istri capres dan cawapres memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan cerdas serta berpengalaman, namun sayang sekali, perihal ini tidak digali media dan menjadi representasi untuk pendidikan publik. Kecerdasan mereka tidak diekspos dan tidak diberikan panggung. Mereka diposisikan sebagai pendamping setia suami dan pendukung pendapat suami mereka. Wawancara yang dilakukan media hanya seputar kegiatan rumah tangga atau drama kisah cinta mereka. Platform pemberdayaan perempuan tidak banyak berbunyi di kedua kubu karena penjelasan platform ini diambil alih oleh partai atau LSM perempuan yang telah memihak. Padahal penguasaan istri-istri capres dan cawapres dalam mendorong platform pemberdayaan perempuan yang disusun oleh tim kampanye penting untuk digali.

Kata Kunci: ibu negara, istri, karir, Pilpres.

Husein Muhammad. Komisioner Komnas Perempuan. JL.
Latuharhary No.4B, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Jakarta
10310, Telp. (021) 3903963

Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam: Tafsir Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah dan Al Adalah

Women's Status in Contemporary Islamic Politics: Tafsir of Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah and Al Adalah.

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 191-196, 6 daftar
pustaka.

This paper examines theological sources of Islam on the status of women in Politics. Al Quran states that equality between men and women are guaranteed in politics such as in Quran: Ali Imran, 195; an Nahl, 97; at Taubah, 71. Islamic politics based on the following postulates: first, freedom (*al Hurriyyah*). Human beings are only serving God. Second, equality (*Musawah*, non-discriminatory). All human being are equal in front of Allah. Third, respect to other human beings (*Karamah al Insan*/ preserving the other human's dignity). Fourth, justice (*'Adalah*). Theological sources of Islam has given foundation for the contemporary status of women in politics which had long been stripped away due to misogynistic interpretation of Quran. Quran has *ontologically supply equality and justice to human rights that can be used in politics and state affairs.*

Keywords: Al Quran, al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah, Al Adalah, politics

Kajian ini membahas sumber-sumber teologi dalam Islam perihal status perempuan dalam politik. Alquran menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan-pekerjaan politik tersebut (Q.S. Ali Imran, 195; an Nahl, 97; at Taubah, 71). Prinsip politik Islam berdasarkan beberapa postulat: *pertama*, kebebasan (*al Hurriyyah*). Manusia hanya menjadi hamba bagi Tuhan. *Kedua*, kesetaraan (*Musawah/Equality* dan *non diskriminasi*): semua manusia adalah sama dan setara di hadapan Allah. *Ketiga*, penghormatan manusia (*Karamah al Insan/Dignity*). *Keempat*, keadilan (*'Adalah/Justice*). *Sumber-sumber teologi Islam memberikan landasan fundamental bagi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupan bersamanya di muka bumi ini. Islam telah meletakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia tentang kesetaraan dalam politik dan kenegaraan.*

Kata kunci: Al Quran, al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah, Al Adalah, politik.

Nihayatul Wafiroh. Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta. Gajah Mada Graduate School Building, III-IV Floor, Jl. Teknik Utara, Pogung, Yogyakarta, Indonesia 55281. Telephone/Fax : +62-274-562570

Genealogi Politik Islam Fatayat di Era Soekarno dan Soeharto: Kajian Feminisme Sejarah Organisasi

Genealogy of Islamic Fatayat Politics in the Era of Soekarno and Soeharto: a Feminist Studies on Organizational History

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 197-205, 21 daftar pustaka.

Indonesian Muslim women had long been an inseparable part from political activities since the colonial period to present era. During colonial era, although they did not work formally under certain Islamic women's organizations, they made real contributions to the women's political movement in Indonesia since they formed women's branches of existing mass organizations. Fatayat, this organization is the sister branch of the largest Islamic organizations in Indonesia: Nahdlatul Ulama. This paper narrates that the involvement of Fatayat in politics had its historical and genealogical roots since Soekarno era. Sukarno facilitated Fatayat to develop power capacity in politics. However, during Soeharto era Fatayat experienced a setback due to New Order's control toward women's organization with its "ibuisism" ideology. In order to maintain its existence, Fatayat decided to collaborate with government by incorporating state's program such as PKK, Posyandu into their activities while also made network with national and international funding organization.

Keywords: politics, Fatayat, NU, Soekarno, Soeharto.

Perempuan Muslim Indonesia tidak dapat dipisahkan dari gerakan politik sejak era kolonial sampai dengan sekarang. Selama era kolonial, organisasi perempuan Muslim merupakan cabang dari organisasi masa muslim. Fatayat adalah saudara bagi organisasi massa bernama Nadlatul Ulama. Mereka memberikan kontribusi besar dalam proses pemberdayaan perempuan. Tulisan ini menarasikan keterlibatan Fatayat dalam politik yang secara genealogis ada sejak jaman Soekarno. Soekarno memberikan kesempatan pada Fatayat untuk mengembangkan kapasitas politiknya. Akan tetapi, kemudian mengalami kemunduran pada era Soeharto. Soeharto mengontrol organisasi-organisasi perempuan melalui ideology "ibuisisme" Negara. Fatayat kemudian memutuskan meleburkan diri dalam kebijakan pemerintah tersebut dengan terlibat dalam PKK, Posyandu, dll—meskipun juga menerima dan mengembangkan jaringan dengan dunia luar.

Kata kunci: politik, Fatayat, NU, Soekarno, Soeharto.

Ira D. Mangililo. Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana. Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga - Indonesia 50711, Telp 0298-321212

Saudari-Saudari yang Hilang dalam Ruang Publik: Kajian Sosio-Teologis Kristen terhadap Peran Politik Perempuan

The Lost-Sisters in the Public Sphere: a Study of Socio-Theological Christianity on the Roles of Women's Politics

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 207-219, 1 gambar, 1 tabel, 23 daftar pustaka.

The purpose of this paper is to understand the role of Indonesian Christian women in the public sphere, especially in the realm of politics. This article aims to reconstruct the role of Israelite women who lived in pre-monarchic Israel using sociological, social science, anthropological, and archeological methods. The result of my analysis shows that the demands of war that occurred continuously in the territory of ancient Israel and the opening of new land in the mountainous regions of Israel required the active participation of women to not only be involved in the reproduction but also the production—an activity that belonged to male members of the family. This phenomenon creates a balance in the division of labor between men

and women which of course increased the status of women in society. The result of this reconstruction that underlines the active role of women in the public sphere in the world of ancient Israel becomes an important model for Christian women in Indonesia today to take an active role in the public sphere, especially in politics.

Keywords: women, public sphere, politics, Christian theology.

Tujuan tulisan ini adalah untuk memahami peran perempuan Kristen Indonesia di ruang publik khususnya di bidang politik. Tulisan ini hendak merekonstruksi peranan perempuan yang hidup pada jaman pra-monarki Israel. Hasil analisa saya menunjukkan bahwa tuntutan peperangan yang terjadi terus-menerus di wilayah Israel kuno dan pembukaan lahan baru di wilayah-wilayah pegunungan Israel menuntut adanya peran aktif dari perempuan untuk tidak hanya terlibat di bidang reproduksi melainkan juga bidang produksi—suatu aktivitas yang biasanya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki. Fenomena ini menciptakan keseimbangan di dalam pembagian kerja di antara laki-laki dan perempuan yang tentu saja meningkatkan status perempuan di dalam masyarakatnya. Hasil rekonstruksi yang menggarisbawahi peranan aktif perempuan di ranah publik di dunia Israel kuno ini akan menjadi model yang penting bagi para perempuan Kristen di Indonesia untuk turut berperan aktif di dalam ranah publik terutama di bidang politik.

Kata kunci: perempuan, ruang publik, politik, teologi Kristen.

Indraswari. Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Jalan Ciumbuleuit No.94, Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40141 . Telp. (022) 203 2655; (022) 204 2004, Faks. (022) 203 1110

Prasangka Budaya atas Tubuh dalam Perda-Perda Diskriminatif: Politisasi Agama atas Perempuan

Cultural Prejudice against Female's Bodies in Discriminative Local Regulations: Politicization of Religion and Women

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 221-226, 18 daftar pustaka.

This article discusses three main issues i.e. women, politics of identity and religion as well as the relationship among them. The three are binded by cultural prejudice casted upon female bodies, specifically in discriminatory by-laws in 342 regions in Indonesia. The discussion takes place within the framework of Indonesia's decentralization which has been marked with among other the implementation of public policies which targeting women's bodies and behavior in the name of morality and religion. The cultural notion is also discussed to provide a better understanding on the complexity of the relationship among the three issues as previously mentioned. This study shows that religion has been used and politicized to ostricised women's rights and other minorities' and vulnerable groups' rights.

Keywords: cultural prejudice, by-laws, religion, women.

Artikel ini membahas tiga isu utama yaitu perempuan, politik identitas dan agama serta relasi di antara ketiganya. Ketiganya diikat oleh prasangka budaya atas tubuh perempuan, terutama dalam 342 perda diskriminatif. Pembahasan dibingkai dalam konteks Indonesia di era desentralisasi yang ditandai dengan antara lain penerbitan berbagai kebijakan publik yang menyangkut tubuh dan perilaku perempuan atas nama moralitas dan agama. Sisi budaya dibahas guna lebih memahami kompleksitas relasi tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa agama telah dipolitikasi untuk meminggirkan suara perempuan dan kelompok rentan lain.

Kata kunci: prasangka budaya, peraturan daerah, agama, perempuan.

Anita Dhewy. Redaksi Jurnal Perempuan. Jl. Lontar No. 12, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960. Telp: 021-83702005, Faks: 021-83706747

Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014

Political Roles of Women in the Legislative and Presidential Election

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 227-232, 7 daftar pustaka.

Female representation in parliament is decreasing in 2014, from 18 to 17 percent. This is not good news at all. It deteriorates further with no focus on women's status in each of presidential candidates. Status of women, sexual minorities, and other vulnerable groups were not becoming focus of issues in debates. Women's movement in near future and in the long run shall fight hard to tackle previous problems. This 2014 General Election has been a powerful tool as well for women to participate and to voice their concern regarding issues of equality and justice. This study unearths how women usher peaceful campaign during the parliament and presidential elections—showing their political engagement to Indonesia as democratic state.

Keywords: general election, parliament election, roles of women.

Representasi perempuan di parlemen menurun di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 ini, dari 18 persen di 2009 menjadi 17 persen di tahun ini. Sementara, status perempuan belum terlihat menonjol dalam konteks visi misi Capres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, yaitu tidak menjadi materi dalam perdebatan. Ke depan gerakan perempuan perlu berjuang lebih panjang lagi. Terlepas dari tantangan tersebut, Pemilihan Umum (Pemilu) tetap menjadi alat partisipasi rakyat yang strategis dan bermakna. Hal ini memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Tak hanya itu, produk Pemilu yaitu parlemen dan presiden-wakil presiden juga relatif bisa dikritik. Kajian ini memaparkan bagaimana perempuan berusaha keras untuk mengawal pemilu damai, demikian juga memajukan suara dan partisipasinya secara politis.

Kata kunci: Pemilu, Pileg, Pilpres, peran perempuan.

Dewi Candraningrum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jalan A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan Kartasura, Jawa Tengah 57102

Agama, Pemilu 2014 dan Status Perempuan sebagai Liyan Religion, 2014 General Election and Status of Women as Other

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 233-240, 8 gambar, 6 daftar pustaka.

This research explains the interaction of religion and politics during the Legislative Election of April 9 and the Presidential Election of July 9, 2014 in considering the status of women. Feminist approaches are often suspicious or cannot believe how the alliance of these two terms (religion and politics) can truly serve the mandate for gender justice and social justice. Explanation of the General Election data affirms the vulnerable status of women and other groups, both within the structure of political parties, proportion of MP's and in the executive development paradigm of the incoming President. The entire women's movement, paradigmatically and practically, needs to work together, shoulder to shoulder, in order to analyse, criticise and nurture these narratives of justice for an equal society in the coming 2014-2019 cabinet period.

Keywords: Election, women, politics, religion, cabinet.

Kajian ini menjelaskan interaksi antara agama dan politik selama Pemilu 9 April dan Pilpres 9 Juli 2014 dalam kaitannya dengan status perempuan. Pendekatan feminis masih mencurigai bagaimana aliansi antara agama dan politik sesungguhnya tak melayani mandat kesetaraan. Penjelasan dari data Pemilu 2014 mengafirmasi status rentan perempuan dan minoritas Liyan baik dalam struktur dan budaya partai politik, yaitu proporsi anggota legislative dan eksekutif. Seluruh gerakan perempuan, dalam fakta ini, perlu bergandengan tangan untuk bekerjasama untuk menulis ulang keadilan gender dalam masyarakat untuk perubahan pada periode kabinet 2014-2019.

Kata kunci: Pemilu, perempuan, politik, agama, kabinet.

Prasangka Budaya atas Tubuh dalam Perda-Perda Diskriminatif: Politisasi Agama atas Perempuan

Cultural Prejudice against Female's Bodies in Discriminative Local Regulations: Politicization of Religion and Women

Indraswari

Universitas Katolik Parahyangan Bandung
Jalan Ciumbuleuit No.94, Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40141
Telp. (022) 203 2655; (022) 204 2004, Faks. (022) 203 1110

indrayayan@yahoo.com

Naskah Diterima 14 Mei 2014. Direvisi 28 Juni 2014. Disetujui: 10 Juli 2014

Abstract

This article discusses three main issues i.e. women, politics of identity and religion as well as the relationship among them. The three are binded by cultural prejudice casted upon female bodies, specifically in discriminatory by-laws in 342 regions in Indonesia. The discussion takes place within the framework of Indonesia's decentralization which has been marked with among other the implementation of public policies which targeting women's bodies and behavior in the name of morality and religion. The cultural notion is also discussed to provide a better understanding on the complexity of the relationship among the three issues as previously mentioned. This study shows that religion has been used and politicized to ostricised women's rights and other minorities' and vulnerable groups' rights.

Keywords: cultural prejudice, by-laws, religion, women.

Abstrak

Artikel ini membahas tiga isu utama yaitu perempuan, politik identitas dan agama serta relasi di antara ketiganya. Ketiganya diikat oleh prasangka budaya atas tubuh perempuan, terutama dalam 342 perda diskriminatif. Pembahasan dibingkai dalam konteks Indonesia di era desentralisasi yang ditandai dengan antara lain penerbitan berbagai kebijakan publik yang menyasar tubuh dan perilaku perempuan atas nama moralitas dan agama. Sisi budaya dibahas guna lebih memahami kompleksitas relasi tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa agama telah dipolitisasi untuk meminggirkan suara perempuan dan kelompok rentan lain.

Kata kunci: prasangka budaya, peraturan daerah, agama, perempuan.

Pendahuluan

Di berbagai belahan dunia tubuh perempuan menjadi ajang pertempuran berbagai ideologi agama dan non-agama dan kaitannya dengan baik-buruk, benar-salah, sopan-tidak sopan. Apa yang dianggap baik, benar, sopan menurut ideologi tertentu dilekatkan pada tubuh perempuan. Sebaliknya apa yang dianggap buruk, salah, tidak sopan menurut ideologi yang lain juga dilekatkan pada tubuh perempuan. Dengan demikian tubuh perempuan menjadi barometer moralitas, religiusitas atau sekularitas masyarakat. Perempuan sendiri sebagai pemilik tubuh jarang dilibatkan dalam penentuan apa yang dianggap baik atau buruk terkait diri

mereka. Jika perempuan disebut, ia tidak lebih dari obyek ketimbang subyek perdebatan. Artikel ini adalah hasil refleksi dan kajian pustaka, bukan hasil penelitian dengan metodologi penelitian yang ketat. Namun untuk melengkapi analisis penulis menyempatkan diri melakukan wawancara singkat dengan beberapa informan.

Prasangka Budaya atas Tubuh dalam Perda-Perda Diskriminatif

Feminis Simone de Beauvoir menyatakan "one is not born but rather becomes a woman". Pernyataan ini mengindikasikan konstruksi sosial yang dilekatkan kepada perempuan tentang "menjadi" perempuan

dan kaitannya dengan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, bermoral atau tidak bermoral. Dalam proses “menjadi” tersebut tentunya tidak menjadi masalah jika perempuan sendiri memiliki otoritas dalam menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Namun seringkali bukan ini yang terjadi. Di berbagai belahan dunia “menjadi perempuan” seringkali berarti perempuan (terpaksa) menerima dan memenuhi berbagai tuntutan normatif tentang bagaimana menjadi perempuan yang baik, solehah, diterima oleh masyarakat dan norma setempat. Suara perempuan seringkali tak didengar, pikiran perempuan tidak terekspresikan, perasaan perempuan dianggap tidak penting. Situasi diatas tidak terlepas dari pemaknaan tentang tubuh perempuan. Karena perempuan tidak bisa dipisahkan dari tubuhnya, maka tubuh perempuan lebih dari sekedar entitas biologis dengan potensi dan kemampuan reproduksi biologis yang menyertainya. Dalam tubuh perempuan dilekatkan serangkaian makna sosial dan kultural. Atas nama agama dan moralitas pemilik tubuh seringkali tidak punya pilihan selain mematuhi tuntutan normatif agar dia diterima dalam lingkungan di mana dia berada.

Menurut Syarifah (2006:80) dalam konstruksi-konstruksi sosial-kultural dan konstruksi seksual-sosialnya, tubuh perempuan adalah modal biologis, sedangkan kebertubuhannya merupakan modal simbolik. Selanjutnya Syarifah menyatakan *pertama*, sebagai modal biologis tubuh perempuan ditandai sebagai inferior dibandingkan dengan tubuh laki-laki menurut patokan-patokan nilai berposisi biner yang dibuat oleh laki-laki (subjek yang mengetahui, subjek yang menjadi pusat akal budi). *Kedua*, modal biologis (tubuh) digabungkan dengan modal simbolik (kebertubuhan) menurut karakteristik-karakteristik sosial tertentu. Kebertubuhan menurut rumusnya adalah perwujudan dari tubuh yang dialami secara khas, berkaitan dengan makna-makna yang diberikan pada misalnya jenis kelamin, norma-norma perilaku tertentu, citra dan identitas yang diharapkan (*ibid*, xvii). Di tataran budaya pemaknaan terhadap (tubuh) perempuan dituangkan dalam norma-norma sosial. Di tataran politik pemaknaan yang sama dituangkan dalam kebijakan publik, termasuk peraturan perundangan dan perda. Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, pada tahun 2013 terdapat 342 kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Perhatian pemerintah terhadap perda-perda bermasalah relatif

terbatas pada perda-perda yang tidak menyangkut perempuan dan kelompok minoritas.

Selama periode 2002-2009 Kementerian Dalam Negeri menganulir 1.878 perda, 1.800 diantaranya adalah perda tentang pajak dan pungutan di daerah, 29 tentang sumbangan politik dari pihak ketiga, dan 22 perda tentang minuman beralkohol (*The Jakarta Post*, 18 Januari 2013). Selain itu ada 758 perda yang berada dalam proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, terdiri dari 589 perda tentang pajak dan pungutan di daerah, 19 perda tentang minuman beralkohol, 79 perda tentang sumbangan politik dari pihak ketiga dan 79 perda lain-lain (*ibid*). Tidak ada satu pun dari perda-perda yang dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri adalah perda yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas (selanjutnya disebut perda moralitas). Hal ini menunjukkan ketidakberanian pemerintah untuk bersikap tegas terhadap perda-perda tersebut. Kebijakan publik adalah cermin budaya masyarakat. Amri Marzali (2012:20) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah produk kultural, sementara itu perancangan dan implementasinya adalah suatu proses kultural, tepatnya lagi proses perubahan kultural yang dilakukan secara terencana dengan tujuan yang disadari (*planned socio-cultural change*)”. Jika kebijakan publik adalah produk budaya maka pertanyaannya adalah budaya macam apa yang dipromosikan melalui formulasi dan implementasi kebijakan publik yang menysasar tubuh dan perilaku perempuan. Jawabannya adalah budaya patriarkis-misoginis yang diskriminatif terhadap perempuan dan memandang perempuan sebagai sumber masalah moralitas. Dalam konteks tersebut, tubuh dan perilaku perempuan dijadikan alat ukur kesalehan atau kebejatan masyarakat. Perempuan adalah target pertama dan utama yang dikenai sangsi sekiranya terjadi pelanggaran moral. Adapun definisi moralitas dan batasannya bersifat samar serta ditentukan oleh subyektifitas penguasa.

Tafsir Jilbab dan Perda Moralitas sebagai Alat Represi Politik

Masalah tubuh dan kebertubuhan perempuan menjadi penting manakala kita berbicara politik identitas, yaitu politik sebagai penanda etnis, agama, jenis kelamin, status sosial, kelompok mayoritas dan minoritas (Putri, 2004). Dalam perspektif politik identitas, tubuh perempuan bukan hanya penanda biologis manusia berjenis kelamin perempuan. Tubuh perempuan adalah penanda sebuah kategori

sosial politik tentang menjadi perempuan yang dalam struktur masyarakat patriarkis termasuk dalam kategori liyan. Di berbagai daerah di Indonesia, wacana tubuh perempuan lebih banyak didominasi sebagai obyek ketimbang subyek politik. Penerbitan berbagai perda moralitas adalah manifestasi bagaimana perempuan dan tubuhnya diperlakukan sebagai obyek politik dan sebagai liyan. Selain sebagai produk budaya, kebijakan publik adalah produk politik, formulasi dan implementasi kebijakan publik adalah proses politik. Penggunaan sumberdaya negara dan penerapan sanksi oleh instrumen negara dilakukan guna memastikan keseluruhan proses formulasi dan implementasi berjalan lancar.

Menelusuri daftar 342 kebijakan publik yang bermasalah menurut data Komnas Perempuan, sebagian besar secara langsung mendiskriminasi perempuan khususnya terkait pengaturan dalam hal pelacuran dan pornografi dengan menyasar perilaku dan busana perempuan. Dalam perspektif sosiologi-politik, kebijakan publik tidak terlepas dari perubahan sosial. Kornblum (2005:262) menyatakan perubahan sosial adalah "variations over time in the ecological ordering of populations and communities, in patterns of roles and social interactions in the structure and functioning of institutions, and in the culture of societies". Perubahan sosial terdiri dari perubahan yang dikehendaki (*intended change*) dan yang tidak dikehendaki (*unintended change*). "Such [intended and unintended] changes can result from social forces building within societies [endogenous forces] as well as from forces for change exerted from outside [exogenous forces]" (*ibid*). Dalam hal perubahan sosial yang dikehendaki (*intended change*) dan berasal dari dalam masyarakat (*endogenous forces*), patut dipertanyakan segmen masyarakat mana yang menghendaki perubahan tersebut. Mengkaji perubahan sosial tanpa perspektif gender tidak akan mampu menangkap realitas adanya tarik menarik kepentingan dan ketimpangan relasi gender di masyarakat. Tanpa perspektif gender, analisis akan mengarah pada generalisasi bahwasanya sebuah perubahan sosial yang dikehendaki (*intended change*) dan yang berasal dari faktor-faktor internal di dalam masyarakat (*endogenous forces*) adalah kehendak bersama seluruh komponen masyarakat.

Menilik minimnya jumlah perempuan di kalangan pengambil keputusan dan kentalnya budaya patriarki, maka suara dan kepentingan perempuan tidak terlalu dipertimbangkan dalam sebuah proses perubahan sosial melalui penerbitan perda moralitas. Secara salah kaprah timbul anggapan bahwa seluruh

komponen masyarakat menginginkan perempuan berpakaian atau berperilaku tertentu. Anggapan tersebut didukung alasan naif yang sudah sangat sering terdengar bahwasanya semua aturan tersebut demi kebaikan dan untuk melindungi perempuan. Perempuan sendiri dengan "sukarela" menerima pengaturan tersebut. Perda moralitas berdampak cukup besar bagi individu perempuan. Bukan hanya hak dan kebebasan mereka dikebiri, di daerah tertentu perda tersebut memakan korban jiwa. Sebut saja Putri seorang remaja di Aceh yang pada tahun 2012 tertangkap polisi syariah saat pulang malam bersama teman-temannya usai menonton konser musik. Putri dipersalahkan karena melanggar aturan pelarangan perempuan keluar malam dan bersama dengan laki-laki yang bukan muhrim. Tekanan psikologis akibat penangkapan tersebut berakibat Putri mengakhiri hidupnya.

Pada tahun 2005 terdapat korban lain, seorang ibu bernama Lilis yang tengah hamil muda ditangkap oleh Satpol PP di Tangerang saat berada di pinggir jalan pada malam hari, menanti angkutan umum usai bekerja di restoran. Di Tangerang terdapat Perda tentang pelacuran. Lilis ditangkap dengan tuduhan pelacur dan sempat ditahan selama tiga hari. Lilis meninggal pada tahun 2008, diduga akibat depresi karena stigma sebagai pelacur yang melekat pada dirinya.

Demikianlah terlihat bagaimana perempuan dipersalahkan dan dikorbankan atas nama moralitas. Dalam kasus di Tangerang, yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah memperbaiki fasilitas transportasi umum dan meningkatkan keamanan bagi perempuan dan laki-laki dalam menggunakan transportasi umum dan beraktifitas di malam hari. Tidak semua perempuan memiliki kemewahan berupa pemilikan kendaraan pribadi dengan supir atau anggota keluarga yang selalu siap sedia menemani. Banyak perempuan termasuk Lilis yang harus mencari nafkah hingga malam hari dan hanya bisa mengandalkan transportasi umum untuk menunjang aktifitas sehari-hari. Selain itu Tangerang sebagaimana halnya kota-kota besar lain di Indonesia adalah kota yang hidup nyaris 24 jam. Aktifitas masyarakat tidak berhenti jam 18.00. Sebaliknya pada jam tersebut ribuan manusia laki-laki dan perempuan masih berjibaku dengan kemacetan lalu lintas saat pulang setelah seharian beraktifitas. Di luar persoalan diskriminasi gender, menjadi tidak relevan penerapan perda yang membatasi gerak langkah masyarakat (perempuan) di malam hari. Terkait perubahan sosial, jika perda-perda moralitas

terus didiamkan bukan tidak mungkin di masa depan perempuan akan “hilang” dari ruang publik.

Kasus yang lain terjadi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam di mana terdapat perda pelarangan perempuan mengenakan celana panjang di tempat umum dan duduk mengangkang saat mengendarai sepeda motor. Sama halnya dengan dua kasus terdahulu, implementasi perda tersebut diperkuat dengan pengerahan sumber daya negara berupa pengerahan polisi syariah/satpol PP untuk melakukan razia. Pelarangan mengenakan celana panjang bagi perempuan tidak hanya terjadi di Aceh. Pada tahun 2009 Lubna Ahmed Al Hussein seorang jurnalis perempuan Sudan menentang pemberlakuan aturan mengenakan celana panjang di muka umum dan menolak tuduhan berbuat kriminal yang ditimpakan kepadanya. Dia ditangkap saat berbusana kemeja dan celana panjang di sebuah restoran di Khartoum. Pemerintah Sudan mengklaim pelarangan celana panjang bagi perempuan sesuai dengan syariah Islam, kurang lebih sama dengan argumen yang dipakai di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Argumentasi pemerintah Sudan adalah memakai celana panjang di muka umum dianggap tidak sopan dan mengakibatkan “ketidaknyamanan publik”. Hukuman bagi pelanggar aturan tersebut adalah membayar denda, penjara dan cambuk. Ada 10 perempuan lain yang ditangkap bersama Lubna yang segera mengakui “kesalahan”, mereka membayar denda dan dicambuk. Lubna dan dua perempuan lain memilih menempuh jalur hukum. Pada akhirnya Lubna tetap dinyatakan bersalah dan diminta untuk membayar denda atau mendekam di penjara selama satu bulan. Lubna memilih masuk penjara meski hanya satu malam. Di luar kehendaknya, asosiasi jurnalis Sudan membayarkan denda untuk membebaskannya dari penjara. Kasus yang berbeda terjadi di Jerman pada tahun 2009 saat seorang perempuan Mesir bernama Marwa El-Sherbini meninggal dunia setelah diserang dengan senjata tajam oleh seorang pria bernama Axel W. di pengadilan Dresden. Pangkal masalah adalah saat Marwa bersama anaknya berada di sebuah taman kota pada bulan Agustus 2008. Saat itu dia meminta ijin Axel W. seorang Jerman keturunan Rusia untuk menggunakan ayunan bagi anaknya. Axel W. memaki dengan menyebut Marwa “teroris” dan “pelacur (*Islamist whore*)”. Pelecehan verbal yang menimpa Marwa terkait dengan jilbab yang dikenakannya. Marwa menolak diam dan menempuh jalur hukum. Pengadilan Dresden memenangkan gugatan Marwa,

namun terdakwa menolak menerima keputusan pengadilan dan menyerang Marwa di pengadilan yang berakibat kematian. Dia wafat dalam usia 31 tahun dalam kondisi hamil anak kedua, meninggalkan suami dan seorang anak balita. Kasus ini sempat menjadi berita utama di Jerman dan di Mesir media massa menyebutnya “headscarf martyr”.

Dari kasus-kasus tersebut jelas terlihat bahwasanya tubuh perempuan adalah ajang pertempuran berbagai ideologi baik yang mengatasnamakan atau tidak mengatasnamakan agama. Indonesia dan Sudan mengatasnamakan agama, Jerman dan berbagai negara Eropa lain mengatasnamakan sekularisme dalam pelarangan atau pelabelan negatif bagi simbol/ekspresi agama tertentu khususnya perempuan berjilbab. Indonesia era desentralisasi berada dalam situasi yang sama sekali berbeda dengan era 1980an terkait busana dan perilaku perempuan. Terlepas dari apapun motivasi pengguna jilbab, kini jilbab menjadi “trend” dan pemakainya adalah mayoritas. Sebaliknya pada era 1980an jilbab belum menjadi “trend” di Indonesia, perempuan berjilbab adalah minoritas. Negara pun melarang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah negeri, berbagai instansi pemerintah dan swasta melarang karyawan perempuan berjilbab (Brenner, 1996:673-697). Banyak individu saat itu melekatkan pelabelan negatif terhadap perempuan berjilbab sebagaimana halnya dengan yang terjadi di Jerman dan negara-negara Eropa lain saat ini.

Aryani (2013) mendeskripsikan secara detail pengalamannya pribadinya sebagai perempuan berjilbab di era 1980an dan berbagai kesulitan yang dialaminya untuk mempertahankan haknya mendapatkan pendidikan di sekolah negeri di tingkat SMP dan SMA di Bogor. Saat di SMA tekanan untuk melepaskan jilbab semakin besar dan membuatnya menempuh jalur hukum agar tetap dapat mengenakan jilbab selama berada di sekolah. Kasus ini sempat menjadi berita di berbagai media massa saat itu. Dengan bantuan pengacara dan intervensi walikota Bogor saat itu, akhirnya Aryani memenangkan gugatan di pengadilan, ia dapat tetap menuntut ilmu di SMA negeri tanpa melepaskan jilbabnya. Secara acak baru-baru ini penulis mengajukan pertanyaan terbuka kepada empat informan yang terdiri dua aparat pemerintah lokal laki-laki dan dua aparat pemerintah perempuan tentang pandangan mereka terhadap perda-perda moralitas. Dua informan berasal dari Pulau Sumatra dan dua dari Pulau Jawa. Secara umum keempatnya menyatakan menyetujui dan tidak melihat adanya masalah terkait penerbitan

dan implementasi perda-perda moralitas. Mereka menambahkan tidak melihat aspek pelanggaran HAM dan sejatinya perda-perda tersebut dibutuhkan untuk menangkai kemerosotan moral masyarakat dan melindungi perempuan.

Seorang informan perempuan menghubungkan isu pakaian perempuan dan maraknya perselingkuhan sebagai dampak dari "banyaknya perempuan memakai baju seksi". Oleh sebab itu menurutnya perlu aturan-termasuk perda-tentang bagaimana berpakaian yang sopan bagi perempuan "agar bapak-bapak tidak tergoda". Seorang informan laki-laki menyatakan keheranannya "saya tidak mengerti mengapa ada saja pihak-pihak tertentu seperti LSM yang menganggap perda-perda tersebut melanggar HAM? HAM mana yang dilanggar?" Saya mencoba menggali lebih dalam pandangan mereka dengan menceritakan tentang jatuhnya korban Putri di Aceh dan Lilis di Tangerang sebagaimana diuraikan diatas. Seorang informan laki-laki menyatakan bahwa perda sejenis tetap diperlukan dan masalah salah tangkap Putri dan Lilis adalah "masalah teknis belaka". Saya menanyakan hal yang sama kepada segmen masyarakat yang berbeda yaitu beberapa mahasiswa laki-laki dan perempuan di Kota Bandung. Secara umum persepsi mereka sama, "tidak ada masalah dengan perda moralitas", "agar perempuan terlindungi", "hanya saja perlu lihat-lihat tempat penerapan perda tersebut". Pernyataan terakhir saya gali lebih jauh dengan menanyakan apa yang mereka maksud dengan "lihat-lihat tempat". Mereka menyatakan perda moralitas mungkin sulit diterapkan di kota besar seperti Jakarta dan Bandung, namun "tidak masalah jika diterapkan di kota-kota lain".

Suatu hari saya menonton liputan sebuah TV swasta yang mempromosikan sebuah daerah di Indonesia sebagai daerah Islami. Secara eksplisit presenter acara tersebut menyatakan daerah yang dimaksud "berpenduduk religius dan taat beragama, ditandai dengan para perempuan berjilbab". Presenter sama sekali tidak menyinggung kemungkinan sebagian perempuan berjilbab "terpaksa" mengenakan jilbab karena perda yang mengharuskan pemakaian jilbab dan razia serta sanksi yang dikenakan bagi mereka yang tidak mematuhi perda tersebut. Seharusnya pemakaian simbol dan ekspresi agama apapun dan dalam bentuk apapun, lahir dari kehendak pribadi dan sebagai ekspresi kecintaan pemeluk agama kepada Tuhannya. Ekspresi keagamaan versi tertentu dan yang dianggap benar oleh kelompok tertentu tidak boleh dipaksakan kepada yang lain. Mereka

yang berekspresi berbeda dengan apa yang kita yakini harus pula dihargai.

Ekspresi keagamaan apapun bentuknya seharusnya tidak didegradasi menjadi sebatas aturan buatan manusia. Tugas negara untuk menjamin kebebasan ekspresi beragama setiap warga negara, tidak berpihak pada agama mayoritas atau interpretasi kelompok tertentu. Dalam praktik tidak mudah melaksanakan hal tersebut. Ada tarik menarik berbagai kepentingan dan kerancuan dalam hal memilah mana yang perlu dan tidak perlu diatur dalam aturan formal. Dalam perspektif sosiologi politik terdapat tingkatan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, dari yang terendah hingga tertinggi yaitu cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), adat istiadat (*customs*) dan hukum (*laws*) (Robertson, 1980; Kornblum, 2005).

Usage adalah norma sosial yang berada dalam tataran paling rendah, pelanggaran terhadap *usage* tidak melahirkan hukuman, melainkan sebatas teguran. *Folkways* satu tingkat lebih tinggi dari *usage*, dengan kekuatan mengikat lebih besar dan sanksi pelanggaran yang lebih berat. *Mores* berada ditingkat selanjutnya dengan kekuatan mengikat lebih besar dari *folkways* dan sanksi lebih berat. *Mores* memberi batas pada perilaku individu dan memaksa orang agar berperilaku sesuai dengan norma setempat. *Customs* memiliki batasan lebih tegas tentang apa yang boleh dan tidak boleh serta sanksi yang menyertainya. Aturan dalam *usage*, *folkways*, dan *mores* tidak tertulis, sedangkan dalam *customs* sebagian aturan dituangkan secara tertulis dengan tetua adat atau tokoh masyarakat sebagai penegak aturan dan pemberi sanksi. *Laws* berada pada peringkat tertinggi dalam tatanan norma sosial dengan aturan seluruhnya tertulis. Pelanggaran *laws* diproses dengan prosedur baku, pemberian sanksi mengacu pada teks hitam di atas putih. Berbeda dengan *usage*, *folkways*, *mores* dan *customs* dimana negara tidak berperan atau berperan tidak langsung, dalam *laws* negara hadir secara utuh dan berperan langsung menjaga segala hal berjalan sesuai hukum yang berlaku.

Terkait kebijakan publik, terjadi kerancuan urusan pakaian dan perilaku perempuan yang seharusnya berada di tataran *mores* atau *customs*, diangkat ke tataran hukum melalui pengaturan yang bersifat formal dan mengikat. Sumber daya negara dikerahkan berupa pembiayaan proses formulasi dan implementasi kebijakan dan pengalokasian sumber daya manusia berupa polisi syariah/satpol PP.

Keduanya menunjukkan intervensi negara dalam pengaturan tubuh dan perilaku perempuan. Otoritas perempuan terhadap dirinya sendiri diminimalkan, bahkan ditiadakan sama sekali. Penerbitan perda-perda moralitas adalah pengejawantahan politik identitas dengan bingkai agama. Di Indonesia tubuh dan perilaku perempuan dijadikan penanda identitas sebuah masyarakat yang “bermoral”, “religius”, “taat beragama”. Di belahan bumi lain tubuh dan perilaku perempuan adalah penanda identitas sebuah masyarakat “sekuler”. Di banyak tempat, tubuh dan perilaku perempuan adalah juga penanda identitas perempuan sebagai kelompok minoritas–tidak dalam arti jumlah–melainkan minoritas dalam hal suara mereka yang “tenggelam” di tengah tarik menarik berbagai kepentingan.

Penutup

Di kalangan feminis terdapat adagium yang terkenal “the personal is political”. Jelas masalah “personal” seperti pemilihan busana dan berperilaku bagi perempuan adalah juga “political”. Oleh sebab itu perlu terus dikedepankan pengarusutamaan gender di semua bidang kehidupan, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bukan hanya bagi perempuan melainkan bagi seluruh komponen masyarakat. Harapannya adalah hal-hal yang “personal” dan “political” tidak perlu lagi bertentangan satu sama lain. Terkait agama, dalam pandangan penulis agama adalah sebuah sistem kepercayaan dan seperangkat nilai yang bersifat ilahiah yang menjadi pedoman umatnya selama hidup di dunia. Agama mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk Tuhan lainnya, bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan melalui ritual tertentu. Bagi pemeluknya teks agama adalah final, namun tidak demikian halnya dengan interpretasi terhadap teks tersebut. Di titik inilah perlu kelapangan hati dan pikiran semua pihak untuk mengakomodasi bukan hanya interpretasi teks agama yang “sehati” namun juga berkehendak baik mau mendengar dan mengakomodasi pihak lain yang memiliki interpretasi berbeda. Di titik ini pula perempuan perlu dilibatkan agar tidak ada lagi interpretasi teks agama yang bias gender, merugikan dan meminggirkan perempuan. Nilai-nilai agama yang bersifat universal seperti kejujuran, non-diskriminasi, kesetaraan, keadilan, anti korupsi, toleransi, pluralisme, kasih, dan penghormatan terhadap sesama, seharusnya menjadi roh yang

menjiwai tatanan politik. Nilai-nilai tersebut perlu diarusutamakan dalam sistem politik dan tata kelola pemerintahan di semua tingkat dan di semua bidang. Akhir kata, mari kembalikan tubuh perempuan kepada pemiliknya.

Daftar Pustaka

- Aryani, Ranti, 2013, *In God we trust: merentang hijab dari Indonesia sampai Amerika*, Matahari, Bandung
- Beauvoir, Simone de, 1987, *The second sex*, Penguin Books, New York
- Brenner, Suzanne, 1996, *Reconstructing self and society: Javanese muslim women and the veil*, *American Ethnologist*, tahun 1996, vol. 23(4), hal. 673-697
- Habermas, Jurgen, *Legitimation crisis*, Beacon Press, USA
- Indraswari, 2013, *Public policy and a dark future for women*, [artikel](#), *The Jakarta Post*, 6 Februari, 2013
- , 2009, *When women are banned from wearing trousers*, [artikel](#), *The Jakarta Post*, 13 November 2009
- , 2009, *Women bodies the battlefield of ideologies*, [artikel](#), *The Jakarta Post*, 2 September 2009
- , 2009, *Our objectives in time of terrible tragedies*, [artikel](#), *The Jakarta Post*, 3 Agustus 2009
- Irigaray, Luce, 2005, *Aku, kamu, kita: belajar berbeda*, Gramedia, Jakarta
- Kornblum, William, 2005, *Sociology in a Changing World*, Thomson Wadsworth, Belmont.
- Marzali, Amri, 2012, *Antropologi dan kebijakan publik*, Kencana, Jakarta.
- Nasir, Mohamad Abdun, 2009, *The politics of the jilbab*, [artikel](#), *The Jakarta Post*, 18 Agustus 2009
- Noerdin, Edriana, 2005, *Representasi perempuan dalam kebijakan publik di era otonomi daerah*, Women Research Institute, Jakarta
- Putri, Vegitya Ramadhani, 2004, *Politik identitas dan nasionalisme, Tionghoa sebagai identitas etnik: suatu perspektif politik identitas dan nasionalisme*, Essay, Yogyakarta
- Robertson, Ian, 1980, *Sociology*, Worth Publishers Inc, New York
- Syarifah, 2006, *Kebertubuhan perempuan dalam pornografi*, Yayasan Kota Kita, Jakarta
- The Indonesian Institute, 2010, *Jalan panjang kerja advokasi: Isu perempuan dan kebijakan publik di Kota Tangerang*, The Indonesian Institute, Jakarta
- The Jakarta Post, 2013, *After ‘straddling’ proposal, ministry to review bylaws*, *The Jakarta Post*, 18 January 2013, Jakarta.

*Indraswari menempuh pendidikan S1 Komunikasi di Universitas Padjadjaran, Bandung (1986-1991), S2 Sosiologi di Universitas Essex, Colchester, Inggris (1994-1996) dan S3 Antropologi di The Australian National University (ANU), Canberra, Australia (2001-2006). Pada tahun 1991-1994 bekerja sebagai peneliti di Yayasan Akatiga, Bandung. Sejak tahun 1996-sekarang bekerja sebagai dosen di Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Sebagian besar tema penelitian yang dilakukan sejak tahun 1991-sekarang adalah tentang perempuan/kesetaraan gender. Selain sebagai dosen, sejak tahun 2006-sekarang menjadi penulis opini di Harian *The Jakarta Post*.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
 - Prof. Merlyna Lim
 - Prof. Jeffrey Winters
 - Dr. Kristi Poerwandari
 - Dr. Ida Ruwaida Noor
 - Dr. Arianti Ina Restiani
 - Dr. Phil. Ratna Noviani
- Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: Status Perempuan dalam Politik.....	iii-iv
Artikel / Articles	
• Etika Feminis Melawan Stigma Teokrasi-Patriarki: Refleksi Pemilihan Presiden 2014 / <i>Feminist Ethics against Stigma of Theocracy-Patriarchy: a Reflection of 2014 Presidential Election</i>	175-182
<i>Rocky Gerung</i>	
• Stereotip Ibu Negara & Karir yang Disembunyikan: Kajian Peranan dan Persepsi Istri Capres-Cawapres pada Pemilihan Presiden 2014 / <i>Stereotype of State's Mother and the Hidden-Career: a Study on the Roles and Perception of Wives of Presidents and Vice Presidents Candidates in the 2014 Election</i> ...	183-189
<i>Gadis Arivia</i>	
• Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam: Tafsir <i>Al Hurriyah</i> , <i>Al Musawah</i> , <i>Al Karamah</i> dan <i>Al Adalah</i> / <i>Women's Status in Contemporary Islamic Politics: Tafsir of Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah and Al Adalah</i>	191-196
<i>Husein Muhammad</i>	
• Genealogi Politik Islam Fatayat di Era Soekarno dan Soeharto: Kajian Feminisme Sejarah Organisasi / <i>Genealogy of Islamic Fatayat Politics in the Era of Soekarno and Soeharto: a Feminist Studies on Organizational History</i>	197-205
<i>Nihayatul Wafiroh</i>	
• Saudari-Saudari Yang Hilang dalam Ruang Publik: Kajian Sosio-Teologis Kristen terhadap Peran Politik Perempuan / <i>The Lost-Sisters in the Public Sphere: a Study of Socio-Theological Christianity on the Roles of Women's Politics</i>	207-219
<i>Ira D. Mangililo</i>	
• Prasangka Budaya atas Tubuh dalam Perda-Perda Diskriminatif: Politisasi Agama atas Perempuan / <i>Cultural Prejudice against Female's Bodies in Discriminative Local Regulations: Politicization of Religion and Women</i>	221-226
<i>Indraswari</i>	
• Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 / <i>Political Roles of Women in the Legislative and Presidential Election</i>	227-232
<i>Anita Dhewy</i>	
• Agama, Pemilu 2014 dan Status Perempuan sebagai Liyan / <i>Religion, 2014 General Election and Status of Women as Other</i>	233-240
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Wawancara / Interview	
• Joko Widodo: "Tidak Boleh Ada yang Menghalangi Perempuan" / <i>Joko Widodo: "No One Shall Block Women's Political Participation!"</i>	241-243
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	245-246
Profil / Profile	
• Feminis Muslim Lies Marcoes-Natsir: "Perlunya Nilai Bersama dalam Menghadapi Fundamentalisme Agama" / <i>Lies Marcoes-Natsir: "We Need Communal Values to Speak Against Religious Fundamentalism"</i>	247-251
<i>Mariana Amiruddin</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Peran Politik Perempuan dalam Gerakan Fundamentalisme / <i>Political Roles of Women against Fundamentalism</i>	253-256
<i>Anita Dhewy</i>	

